

MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,	BUPATI TEMANGGUNG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan; b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang	a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan; b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil

<p>peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p>	<p>hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;</p> <p>c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha peternakan dan Kesehatan hewan melalui sebuah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;</p> <p>d. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
--	---

<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18);</p>
--	---

<p>diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan;</p>	
---	--

<p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>

<p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG</p>	<p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG dan BUPATI TEMANGGUNG</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

<ol style="list-style-type: none"> 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. 5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. 8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. 8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
--	--

<p>10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.</p> <p>11. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.</p> <p>12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.</p> <p>13. Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.</p> <p>14. Ternak kecil adalah kambing domba dan babi.</p> <p>15. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.</p> <p>16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.</p> <p>17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.</p> <p>18. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.</p>	<p>10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.</p> <p>11. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.</p> <p>12. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.</p> <p>13. Ternak Besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.</p> <p>14. Ternak Kecil adalah kambing domba, dan babi.</p> <p>15. Ternak Ruminansia adalah ternak yang memiliki sistem pencernaan yang komplek terdiri dari empat perut yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum.</p> <p>16. Aneka Ternak adalah berbagai jenis hewan yang sengaja dipelihara dan dikembangkan, selain jenis Ternak yang biasa dipelihara (ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, babi), yang tidak biasa dipelihara namun dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemenuhan kebutuhan manusia.</p> <p>17. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.</p>
--	--

<p>19. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.</p> <p>20. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.</p> <p>21. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.</p> <p>22. Air susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.</p> <p>23. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.</p> <p>24. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.</p> <p>25. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.</p> <p>26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.</p> <p>27. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.</p>	<p>18. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.</p> <p>19. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.</p> <p>20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.</p> <p>21. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.</p> <p>22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.</p> <p>23. Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan Air.</p> <p>24. Air Susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.</p> <p>25. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum,</p>
--	--

<p>28. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.</p> <p>29. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.</p> <p>30. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.</p> <p>31. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>32. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>33. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.</p> <p>34. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara</p>	<p>yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.</p> <p>26. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.</p> <p>27. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.</p> <p>28. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.</p> <p>29. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.</p> <p>30. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.</p> <p>31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.</p>
---	---

<p>teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.</p> <p>35. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.</p> <p>36. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.</p> <p>37. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.</p> <p>38. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.</p> <p>39. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.</p> <p>40. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik</p>	<p>32. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.</p> <p>33. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>34. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.</p> <p>35. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.</p> <p>36. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.</p> <p>37. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.</p> <p>38. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.</p>
--	---

<p>yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.</p> <p>41. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.</p> <p>42. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.</p> <p>43. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.</p> <p>44. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.</p> <p>45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban</p>	<p>39. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.</p> <p>40. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disingkat PHMS adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonosis.</p> <p>41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.</p> <p>42. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.</p> <p>43. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.</p> <p>44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk</p>
---	---

<p>dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>48. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.</p>	<p>melindungi hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.</p> <p>45. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.</p> <p>46. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.</p> <p>47. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.</p> <p>48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>49. Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan Kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan.</p>
---	--

	<p>50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>52. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.</p>
<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.</p> <p>(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan. 	
<p>BAB III SUMBER DAYA</p>	
<p>Bagian Kesatu Lahan</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.</p>	
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukkan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di</p>	

<p>tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Air</p>	
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>PETERNAKAN</p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Benih, Bibit, dan Bakalan</p>	
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>

<p>(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.</p> <p>(2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p>	<p>(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan, silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p> <p>(6) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Dalam rangka menjamin mutu Bibit yang beredar dilakukan pengawasan mutu Bibit oleh pejabat fungsional pengawas Bibit atau petugas yang berwenang.</p>
<p>Pasal 7</p>	

<p>Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan.</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan.</p> <p>(2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan Bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.</p> <p>(2) Penentuan Ternak Ruminansia Betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.</p> <p>(3) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia Kecil Betina Produktif atau Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.</p> <p>(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian; b. pemuliaan; c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; d. ketentuan agama; e. ketentuan adat istiadat; dan/atau f. pengakhiran penderitaan Hewan.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pakan</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.</p>	
	<p>4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.</p> <p>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi; b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.</p> <p>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap Orang dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi; b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

(5) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	(5) Pengawasan terhadap mutu Pakan dan/atau bahan Pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu Pakan atau petugas yang berwenang.
Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan	
Pasal 11 Alat dan mesin peternakan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.	
Bagian Keempat Budi Daya	
Pasal 12 (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.	5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan baik Ternak Besar, Ternak Kecil, Aneka Ternak, dan Unggas. (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 13 (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.	6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Budi daya Ternak dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

<p>(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati.</p> <p>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.</p> <p>(6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha mikro harus memiliki Tanda Bukti Pendataan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan skala usaha kecil harus memiliki Surat Tanda Daftar melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.</p> <p>(3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala usaha menengah dan besar, wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.</p> <p>(4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.</p> <p>(6) Tata cara dan persyaratan memperoleh Tanda Bukti Pendataan Usaha di Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
<p>Pasal 14</p>	

<p>(1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.</p> <p>(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. antar peternak; b. antara peternak dan perusahaan peternakan; c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah daerah. <p>(3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	

<p>(1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Panen, Pascapanen, Pemasaran Dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.</p> <p>(2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika, dan estetika.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.</p> <p>(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang peternakan dan produk hewan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KESEHATAN HEWAN</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.</p> <p>(2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.</p> <p>(3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.</p>	

<p>(2) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan penyakit hewan menular strategis; b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan; c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity; d. pengebalan hewan; 	

<p>e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;</p> <p>f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan</p> <p>g. penerapan kewaspadaan dini.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.</p> <p>(4) Bupati menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis dalam pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.</p>	

<p>(2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.</p> <p>(3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan masyarakat.</p> <p>(4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.</p> <p>(2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada perorangan dan/atau perusahaan peternakan atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.</p>	

<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan berwenang.</p> <p>(2) Bupati menetapkan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner.</p>	

- | | |
|---|--|
| <p>(2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.</p> <p>(3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p> <p>(5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.</p> <p>(6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.</p> <p>(7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud</p> | |
|---|--|

<p>pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.</p> <p>(2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parental harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.</p> <p>(3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di eutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.</p> <p>(4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dapat dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.</p> <p>(5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/ atau tenaga kesehatan hewan di bawah</p>	

pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Obat Hewan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Obat hewan berdasarkan sediaan dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami. (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.	
	7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat depo, apotik veteriner, pet shop, poultry shop, dan toko obat hewan.
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p>	

<p>(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.</p> <p>(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu. <p>(3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di b. Indonesia; c. tidak memiliki nomor pendaftaran; d. tidak diberi label dan tanda; dan e. tidak memenuhi standar mutu.

	(3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin peredaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KESEHATAN MASYRAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	
Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; c. penjaminan higiene dan sanitasi; d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan e. penanganan bencana. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan. (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. 	

<p>(3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian standardisasi, identifikasi, dan registrasi produk hewan.</p> <p>(2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

<p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>	
<p>Bagian Kedua Usaha Pemotongan Hewan</p>	
	<p>9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil); dan b. Rumah Potong Unggas (RPU). <p>(2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan di RPH; b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. <p>(3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah agama.</p> <p>(4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPH Ruminansia untuk Ternak Besar, dan Ternak Kecil; dan b. Rumah Potong Unggas. <p>(2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan di RPH; dan b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan. <p>(3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.</p> <p>(4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan Hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemotongan Hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan Dokter</p>

<p>dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.</p> <p>(7) Ketentuan tata cara persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Hewan atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemotongan Hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila Hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.</p> <p>(7) Ketentuan tata cara persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan Hewan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>
	<p>10. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>(2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati.</p> <p>(3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>(4) Pelaku pemotongan hewan yang selanjutnya disebut jagal wajib memiliki izin pemotongan hewan dari Bupati.</p> <p>(5) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>(2) Usaha RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.</p> <p>(3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>(4) Pelaku pemotongan Hewan atau juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan</p>	
	11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) BAH dan HBAH dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan BAH dan HBAH dan Surat Keterangan Asal BAH dan HBAH serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Lalu lintas HPM dapat dilakukan antar wilayah atau kawasan.</p> <p>(2) Lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan setelah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.</p> <p>(3) Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner Provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan b. memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Wilayah Tujuan.
	12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) BAH dan HBAH yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan BAH dan HBAH dan Surat Keterangan Asal BAH dan HBAH yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual BAH dan HBAH diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>HPM yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan HPM dan Surat Keterangan Asal HPM yang dikeluarkan Dokter Hewan yang berwenang.</p>
	13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah BAH dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daging ilegal; b. daging gelonggongan; c. daging oplosan; d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan HPM yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daging ilegal; b. daging gelonggongan; c. daging oplosan; d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Daging yang dibawa keluar dari RPH harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya. (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama. (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam : 	

<p>a. kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;</p> <p>b. kotak pameran harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.</p> <p>(2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Usaha Persusuan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Untuk menghasilkan susu yang sehat dan berkualitas, setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.</p>	

<p>(2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
	<p>14. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Air Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita PHMS atau menderita penyakit Hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan Air Susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.</p>
	<p>15. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat standarisasi.</p> <p>(2) Pengawasan kualitas air susu meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis; b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium; c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Air Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat standarisasi.</p> <p>(2) Pengawasan kualitas Air Susu meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis; b. pengambilan contoh Air Susu untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan; c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar Air Susu dan peralatan yang dipergunakan dan

<p>lainlain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas air susu; dan</p> <p>d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air susu, pejabat mempunyai wewenang :</p> <p>a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau unit kambing perah, penampungan air susu dan penjualan air susu;</p> <p>b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual susu dan/ atau kendaraan pengangkut air susu.</p>	<p>lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas Air Susu; dan</p> <p>d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan Air Susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas Air Susu, pejabat mempunyai wewenang :</p> <p>a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau unit kambing perah, penampungan Air Susu dan penjualan Air Susu;</p> <p>b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual Air Susu dan/atau kendaraan pengangkut Air Susu.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Contoh air susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung air susu dan kendaraan pengangkut air susu.</p> <p>(2) Jumlah contoh air susu yang diambil sekurang-kurangnya 500 ml.</p>	
	<p>16. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :</p> <p>a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:</p> <p>a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, usaha RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat</p>

<p>dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;</p> <p>b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan</p> <p>c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.</p> <p>(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>pengolahan dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk Hewan;</p> <p>b. surveilans terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan</p> <p>c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.</p> <p>(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kesejahteraan Hewan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan,</p>	

<p>pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan	
--	--

<p>g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.</p>	
<p>BAB VII OTORITAS VETERINER</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan Siskeswanas dibutuhkan otoritas veteriner guna menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.</p> <p>(3) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesmavet, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner.</p>	
	<p>17. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 58</p>	<p>Pasal 58</p>

<p>(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Puskesmas.</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan Bupati.</p> <p>(3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Puskesmas.</p> <p>(2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin yang dikeluarkan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.</p> <p>(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner yaitu mereka yang memiliki Diploma Kesehatan Hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.</p> <p>(3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.</p>	

<p>(4) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.</p> <p>(5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.</p>	
	18. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktek Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis; c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha; e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan; f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran. <p>(3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk</p>	

<p>pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternakan dan masyarakat.</p>	
<p>BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p> <p>(2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.</p> <p>(3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan; b. penyuluhan; dan c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	
<p>BAB X SANKSI ADMINISTRATIF</p>	

	19. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan izin; dan d. pengenaan denda. <p>(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, Alat dan Mesin atau Produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin. <p>(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p>BAB XI PENYIDIKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

<p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;d. melakukan penyitaan benda dan surat;e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atauh. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA</p>	
	<p>20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>(3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Setiap Orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Juni 2012 BUPATI TEMANGGUNG, ttd HASYIM AFANDI	Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 27 Juni 2024 Pj. BUPATI TEMANGGUNG, ttd HARY AGUNG PRABOWO
Diundangkan di Temanggung pada tanggal 19 September 2012	Diundangkan di Temanggung pada tanggal 27 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd BAMBANG AROCHMAN	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, ttd AGUS SUJARWO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 18	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 8